PERAN SISTEM INFORMASI DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MENCEGAH KORUPSI: STUDI LITERATURE REVIEW

Anita Juvita Sari[1], Mudiah Salsabella Sutomo[2], Rini Fatmawati[3]
anitajuvitasari05@gmail.com[1], mudiahsalsabella.s@gmail.com[2],
rinifatmawati2208@gmail.com[3]
[123]Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang
Korespondensi: rinifatmawati2208@gmail.com

Abstract

The distribution of social assistance is one of the government programs aimed at improving public welfare and reducing poverty levels. However, in its implementation, various problems are still encountered, such as inaccurate recipient data, delays in aid distribution, lack of transparency, and the potential for corruption. Information systems have become one of the solutions that can be utilized to improve transparency and accountability in the management of social assistance programs. This study aims to analyze the role of information systems in enhancing the transparency of social assistance distribution and their contribution to corruption prevention efforts. The research method used is qualitative with a literature review design. Data were collected from various scientific articles, national and international journals, and other publications relevant to the research topic. The review of 12 articles indicates that information systems play a significant role in improving the effectiveness of beneficiary data management, accelerating administrative processes, supporting program monitoring and evaluation, and increasing transparency and accountability in social assistance distribution. In addition, information systems contribute to reducing opportunities for irregularities through digitally documented data recording and strengthened monitoring mechanisms. Therefore, information systems can be considered an important instrument in supporting transparent, effective, and accountable governance of social assistance programs.

Keywords: *Information System, Transparency, Social Assistance, Corruption, Accountability.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan data dan pelayanan publik dilakukan secara lebih efektif, efisien serta transparan (Kardina et al., 2024). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sistem informasi berperan sebagai sarana untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat akuntabilitas (Maulida, 2025). Menurut Hakim et al., (2024) salah satu bidang yang banyak memanfaatkan sistem informasi adalah pengelolaan program bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemanfaatan sistem informasi dalam program bantuan sosial menjadi semakin penting karena proses pengelolaan bantuan melibatkan data penerima yang besar, mekanisme penyaluran yang kompleks, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Melalui sistem informasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan memastikan bantuan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima.

Bantuan sosial merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan (Sembiring & Nabanan, 2024). Berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan program perlindungan sosial lainnya (Rizki, 2021). Keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta transparansi dalam proses pelaksanaannya (Novianti et al., 2026). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang dapat menghambat efektivitas program tersebut, seperti data penerima yang tidak akurat, keterlambatan penyaluran, penyalahgunaan kewenangan, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berbagai permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan celah terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan dan distribusi bantuan sosial. Ketika mekanisme pengawasan dan transparansi belum berjalan secara optimal, peluang terjadinya penyalahgunaan sumber daya dan manipulasi data menjadi semakin besar.

Seiring dengan meningkatnya anggaran bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah setiap tahun, risiko terjadinya penyimpangan dan tindak korupsi juga menjadi perhatian penting. Menurut Falah et al., (2026), korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi data penerima manfaat, pemotongan dana bantuan, pengadaan yang tidak transparan, hingga penyalahgunaan jabatan oleh pihak yang terlibat dalam proses distribusi bantuan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan secara layak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Dalam era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu alternatif yang banyak diterapkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola program pemerintah (Yusman et al., 2024). Teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan data, pemantauan kegiatan, serta pelaporan pelaksanaan program dilakukan secara lebih terintegrasi, akurat, dan transparan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial adalah melalui penerapan sistem informasi. Sistem informasi memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat (Pilliang et al., 2026). Selain itu, menurut Pramana (2025) sistem informasi juga memungkinkan tersedianya data yang dapat diakses secara lebih mudah oleh pihak terkait, sehingga meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses verifikasi data penerima bantuan, pemantauan distribusi bantuan, serta pelaporan pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih efektif.

Peningkatan efektivitas tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung administrasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program pemerintah (Tambunan & Dompak, 2025). Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi dalam sektor publik telah menjadi perhatian berbagai peneliti yang berupaya mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Penelitian oleh Mappisabbi et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan digital government berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan keterbukaan data. Selain itu, penelitian oleh Irfan & Anirwan (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dalam konteks bantuan sosial, penelitian oleh Hakim (2025) mengemukakan bahwa sistem informasi bantuan sosial dapat mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pengelolaan data penerima, distribusi bantuan, serta pelaporan yang terdokumentasi secara digital. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi sistem informasi atau digitalisasi pelayanan publik secara umum maupun perancangan sistem bantuan sosial tertentu. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan pembahasan mengenai sistem informasi, transparansi penyaluran bantuan sosial, dan pencegahan korupsi masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai temuan penelitian mengenai peran sistem informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sistem informasi dalam mendukung tata kelola bantuan sosial yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial serta mengidentifikasi kontribusinya dalam upaya pencegahan korupsi berdasarkan hasil kajian berbagai literature yang relevan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi *literature review*. *Literature review* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena atau permasalahan (Ridwan et al., 2021). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran sistem informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial untuk mencegah korupsi.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep, temuan, dan hubungan antarvariabel yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Menurut Creswell (dalam Dewi, 2025), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena sosial berdasarkan berbagai sumber informasi yang tersedia. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji bagaimana sistem informasi berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta perannya dalam meminimalkan risiko terjadinya korupsi.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah. Data sekunder dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, prosiding konferensi, laporan lembaga pemerintah, dokumen kebijakan publik, serta publikasi dari lembaga yang berkaitan dengan bantuan sosial, tata kelola pemerintahan, sistem informasi, dan pencegahan korupsi.

Pemilihan sumber literatur dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan publikasi. Literatur diperoleh melalui berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, Semantic Scholar, dan sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses secara terbuka. Literatur yang dipilih merupakan publikasi yang membahas sistem informasi, transparansi pemerintahan, bantuan sosial, digitalisasi pelayanan publik, serta pencegahan korupsi. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian sehingga mampu mendukung proses analisis secara komprehensif.

Setelah sumber data ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan.

Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik penelitian dan tujuan kajian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi mengenai implementasi sistem informasi dalam penyaluran bantuan sosial, transparansi pengelolaan program pemerintah, serta upaya pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi literatur secara sistematis untuk menemukan tema, konsep, serta pola hubungan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan berbagai temuan penelitian terdahulu mengenai peran sistem informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial dan pencegahan korupsi.

Tahapan literature review yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi identifikasi literatur, seleksi literatur, ekstraksi data, analisis data, dan sintesis hasil penelitian. Adapun tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Literatur**

   Pada tahapan identifikasi literatur, peneliti melakukan pencarian berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian menggunakan kata kunci seperti sistem informasi, transparansi, bantuan sosial, korupsi, *e-government*, *digital governance*, dan *social assistance information system*. Pencarian dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah untuk memperoleh literatur yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. **Seleksi Literatur**

   Tahap seleksi literatur dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang telah ditemukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Literatur yang dipilih merupakan publikasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem informasi, transparansi penyaluran bantuan sosial, dan pencegahan korupsi. Sementara itu, literatur yang tidak relevan atau memiliki pembahasan yang terlalu umum tidak digunakan dalam proses analisis.

3. **Ekstraksi Data**

   Pada tahap ekstrraksi data, peneliti mengidentifikasi dan mencatat informasi penting dari setiap literatur yang digunakan. Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta temuan yang berkaitan dengan peran sistem informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bantuan sosial.

4. **Analisis dan Sintesis Data**

   Tahap analisis dan sintesis data dilakukan dengan mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema-tema tertentu. Peneliti membandingkan berbagai temuan dari literatur yang telah dipilih untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta hubungan antarhasil penelitian. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sistem informasi terhadap transparansi penyaluran bantuan sosial dan pencegahan korupsi.

5. **Penyusunan Kesimpulan**

   Tahap terakhir adalah penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis literatur yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan gambaran mengenai peran sistem informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial sebagai upaya pencegahan korupsi.

   Tahapan penelitian tersebut digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran sistem informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial serta pencegahan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hasil Seleksi dan Sintesis Literatur

Berdasarkan proses identifikasi dan seleksi literatur yang dilakukan melalui Google Scholar dan berbagai sumber ilmiah lainnya, diperoleh 12 artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Artikel-artikel tersebut membahas implementasi sistem informasi, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan bantuan sosial, transparansi pemerintahan, serta upaya pencegahan korupsi. Ringkasan karakteristik penilaian yang meliputi penulis, judul penelitian, metode yang digunakan, dan temuan utama disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Literatur Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama
1	Alfedo & Azmi (2020)	Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan	Yuridis Normatif	Sistem informasi Si Pansos dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial.
2	Ardelia & Yuadi (2023)	Digital Government dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik: Suatu Analisis Berdasarkan Perspektif Bibliometrik	Bibliometrik	Digital government berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik.
3	Zebua et al. (2024)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan di Desa Balohili Botomuzoi	Kualitatif Deskriptif	SIKS-NG membantu pengelolaan usulan bantuan sosial, meskipun masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan pelatihan operator.
4	Safitri & Sa'diyah (2026)	Efektivitas Penerapan Aplikasi SIKS-NG untuk Pendataan Bantuan Sosial Berdasarkan DTSEN di Dinas Sosial Kota Pasuruan	Kualitatif Deskriptif	Integrasi data melalui SIKS-NG meningkatkan ketepatan sasaran dan mendukung transparansi pendataan bantuan sosial.
5	Aprilia & Choiriyah (2024)	Assesing SIKS-NG for Poverty Data Management in Social Welfare	Kualitatif	Akurasi data, sosialisasi, dan monitoring menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem informasi kesejahteraan sosial.

6	Rizqi & Mursyidah (2025)	Effectiveness of Proposing Social Assistance Through the SIKS-NG Application in Improving the Welfare of Rural Communities	Kualitatif	Pemanfaatan SIKS-NG mendukung efektivitas pengajuan bantuan sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
7	Agus et al. (2025)	Pengembangan Platform Web untuk Monitoring dan Evaluasi Data Bantuan Sosial Berbasis Teknologi Informasi	Research and Development (R&D)	Platform web yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan bantuan sosial, mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data penerima, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas distribusi bantuan sosial. Sistem memperoleh skor usability (SUS) sebesar 82,3 yang termasuk kategori sangat layak digunakan.
8	Santoso (2025)	Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan	Literature Review	Digitalisasi pemerintahan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik.
9	Wahyuni (2022)	Pengembangan Sistem Informasi Penerima Bantuan Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Efiesiensi Distribusi	Research and Development (R&D)	Sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi kesalahan data penerima bantuan.
10	Sarjito & Djati (2025)	Administrative Justice in Algorithm-Based Social Assistance Distribution Systems: A Study of Digital Transparency in Public Service in Indonesia	Kualitatif	Transparansi digital berperan dalam meningkatkan keadilan administrative dalam distribusi bantuan sosial.
11	Harinin et al. (2020)	Rancang Bangun Sistem Informasi Bansos Berbasis Web	Pengembangan Sistem	Sistem informasi bansos berbasis web mempermudah pengelolaan data penerima dan proses pelaporan.

12	Ciancarini et al. (2024)	Digital Transformation in the Public Administrations: A Guided Tour for Computer Scientist	Literature Review	Transformasi digital sektor publik meningkatkan kualitas tata kelola melalui data terbuka, teknologi informasi, dan transparansi layanan.

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bantuan sosial, transparansi pelayanan publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan program pemerintah. Penelitian yang membahas implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), seperti yang dilakukan oleh Zebua et al. (2024), Safitri & Sa'diyah (2026), Aprilia & Choiriyah (2024), serta Rizqi & Mursyidah (2025), menunjukkan bahwa sistem informasi mampu mendukung pengelolaan data penerima bantuan secara lebih akurat, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, dan mempermudah proses administrasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agus et al. (2025), Wahyuni (2022), dan Harinin et al. (2020) menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat pelaporan, serta mendukung proses monitoring dan evaluasi bantuan sosial secara lebih efektif.

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, penelitian Alfedo & Azmi (2020) Ardelia & Yuadi (2023), Ciancarini et al. (2024), Santoso (2025), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi, pengawasan, dan tata kelola publik yang lebih baik. Sistem informasi memungkinkan data dan proses pelayanan terdokumentasi secara digital sehingga lebih mudah dipantau oleh pihak terkait maupun masyarakat. Kondisi tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan karena setiap aktivitas dapat ditelusuri melalui data yang tersimpan dalam sistem.

Sementara itu, penelitian Sarjito & Djati (2025) menyoroti bahwa transparansi digital dalam distribusi bantuan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi administrasi, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan administratif bagi masyarakat penerima bantuan. Secara keseluruhan, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntablitas, efisiensi pengelolaan data, dan pengawasan penyaluran bantuan sosial. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem informasi yang terintegrasi dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung upaya pencegahan korupsi pada program bantuan sosial melalui peningkatan keterbukaan informasi dan penguatan mekanisme pengawasan.

2. Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan dan Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil sintesis literatur, sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan dan transparansi penyaluran bantuan sosial. Penelitian Zebua et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) membantu proses pengolahan data kemiskinan dan pengusulan bantuan sosial secara lebih terstruktur. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Rizqi & Mursyidah (2025) yang menemukan bahwa penggunaan SIKS-NG mampu meningkatkan efektivitas proses pengajuan bantuan sosial dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain mendukung pengelolaan data, sistem informasi juga berperan dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui penyediaan data yang lebih akurat dan terdokumentasi secara digital. Penelitian Harinin et al. (2020) menunjukkan

bahwa sistem informasi bantuan sosial berbasis web mempermudah pengelolaan data penerima bantuan serta proses pelaporan. Sementara itu, penelitian Agus et al. (2025) juga menunjukkan bahwa platform monitoring dan evaluasi bantuan sosial berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat pelaporan, dan mendukung proses pemantauan program bantuan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial.

3. Sistem Informasi sebagai Pendukung Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu manfaat utama yang diperoleh melalui penerapan sistem informasi dalam penyaluran bantuan sosial. Penelitian Ardelia & Yuadi (2023) menunjukkan bahwa digital government berperan dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan keterbukaan data. Dalam konteks bantuan sosial, keterbukaan informasi menjadi penting untuk emmastikan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan distribusi bantuan dapat diketahui erta diawasi oleh berbagai pihak.

Penelitian Safitri & Sa'diyah (2026) menunjukkan bahwa integrasi data melalui aplikasi SIKS-NG mampu meningkatkan transparansi pendataan penerima bantuan sosial serta mendukung ketepatan sasaran program. Selain itu, penelitian Agus et al. (2025) menemukan bahwa platform berbasis web memungkinkan proses monitoring dan evaluasi bantuan sosial dilakukan secara lebih terbuka melalui penyediaan informasi yang mudah diakses. Dengan adanya sistem informasi, seluruh proses penyaluran bantuan sosial dapat terdokumentasi secara digital sehingga memudahkan proses pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pelaksana program, serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam distribusi bantuan.

4. Kontribusi Sistem Informasi dalam Pencegahan Korupsi

Berdasarkan hasil kajian literatur, sistem informasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi pada program bantuan sosial. Penelitian Alfedo & Azmi (2020) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem tersebut memungkinkan seluruh proses pengelolaan bantuan sosial terdokumentasi secara sistematis sehingga mempermudah proses pengawasan dan audit.

Selain itu, penelitian Sarjito & Djati (2025) menunjukkan bahwa transparansi digital dalam distribusi bantuan sosial berperan dalam meningkatkan keadilan administratif. Penelitian Ciancarini et al. (2024) dan Santoso (2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan mampu memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas tata kelola publik. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi melalui pencatatan data yang terdokumentasi secara digital, peningkatan transparansi informasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta kemudahan proses audit terhadap seluruh tahapan penyaluran bantuan sosial.

5. Tantangan Implementasi Sistem Informasi

Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi sistem informasi dalam pengelolaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian Aprilia & Choiriyah (2024) menunjukkan bahwa akurasi data, sosialisasi, dan monitoring merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem informasi kesejahteraan sosial. Data yang tidak akurat dapat memengaruhi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial meskipun telah didukung oleh sistem informasi yang memadai.

Selain itu, penelitian Zebua et al. (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan pelatihan bagi operator sistem dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal. Tantangan lainnya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur

teknologi informasi dan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas data, sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur.

6. Analisis Temuan Literatur

Berdasarkan keseluruhan artikel yang dianalisis, ditemukan bahwa sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tata kelola bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data penerima bantuan, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah monitoring dan evaluasi program bantuan sosial. Selain itu, digitalisasi proses bantuan sosial juga berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi dan penguatan mekanisme pengawasan.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan melalui sistem informasi memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencegahan korupsi. Dokumentasi data secara digital, kemudahan akses informasi, serta tersedianya mekanisme pelacakan aktivitas dalam sistem memungkinkan proses penyaluran bantuan sosial diawasi secara lebih efektif. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya berperan sebagai sarana pengelolaan data, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam program bantuan sosial. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil sintesis dari dua belas artikel yang dianalisis, sistem informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola bantuan sosial, khususnya pada aspek pengelolaan data, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Temuan literatur menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu mendukung proses pendataan, verifikasi, validasi, serta distribusi bantuan sosial secara lebih terstruktur dibandingkan dengan metode konvensional. Pemanfaatan sistem informasi seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) memungkinkan data penerima bantuan dikelola secara terintegrasi sehingga meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui sistem informasi, data penerima bantuan, proses distribusi, serta pelaksanaan program dapat terdokumentasi secara digital dan lebih mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Kondisi ini mendukung keterbukaan informasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan sosial.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan melalui sistem informasi memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan korupsi. Dokumentasi data secara digital memungkinkan setiap aktivitas dalam proses penyaluran bantuan sosial dapat ditelusuri dan diaudit dengan lebih mudah. Dengan demikian, peluang terjadinya manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang mendukung integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi masih dipengaruhi oleh kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Faktor-faktor tersebut menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal

dalam mendukung transparansi penyaluran bantuan sosial dan pencegahan korupsi. Secara keseluruhan, hasil literature review ini menunjukkan bahwa sistem informasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Hasil sintesis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data penerima bantuan, mempercepat proses administrasi, mendukung monitoring dan evaluasi program, serta meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Selain itu, sistem informasi juga berkontribusi dalam meningkakan tranparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang terdokumentasi secara digital sehingga memudahkan proses pengawasan dan pelacakan data. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa transparansi yang didukung oleh sistem informasi dapat memperkecil peluang terjadinya penyimpangan, seperti manipulasi data penerima, penyalahgunaan kewenangan, dan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi sistem informasi masih dipengaruhi oleh kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, optimalisasi sistem informasi perlu didukung oleh pengelolaan data yang baik, peningkatan kapasitas pengguna, dan penguatan kebijakan pengawasan agar tata kelola bantuan sosial dapat berjalan secara lebih transparan, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sistem informasi dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial sekaligus mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, R., Hidayah, R. E., & Nugroho, A. Y. (2025). Pengembangan platform web untuk monitoring dan evaluasi data bantuan sosial berbasis teknologi informasi. *Jurnal Sains Sistem Informasi*, *3*(2), 59–66. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JSSI/article/viewFile/18953/7522

Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, *6*(2), 283–296.

Aprilia, M., & Choiriyah, I. (2024). Assessing SIKS-NG for poverty data management in social welfare. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, *25*(3). https://elibrary.ru/item.asp?id=74929263

Ardelia, S. I. M., & Yuadi, I. (2023). Digital Government Dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik: Suatu Analisis berdasarkan Perspektif Bibliometrik. *Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *7*(2), 111–128. https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937

Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2024). Digital Transformation in the Public Administrations : A Guided Tour for Computer Scientists. *IEEE Access*, *12*, 22841–22865. https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/6514899/10423006.pdf

Dewi, P. M. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif BAB*. Metode Penelitian Kualitatif. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=OhhXEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA101&dq=Menurut+Creswell+(2018),+penelitian+kualitatif+bertujuan+untuk+memahami+dan+menginterpretasikan+fenomena+sosial+berdasarkan+berbagai+sumber+informasi+yang+tersedia&ots=sest5p7PAK&sig=0xELrBjO-kioSelfAIZAz0p0lq8

Falah, N. N., Liany, L., Nadilla, I., Safnuri, A. C., Nitisara, V. A., Setialin, A. N., & Aflah, R. (2026). Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Cilacap, Jawa Tengah Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 2477–2491.

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/3490/2195

Hakim, A., Badjo, A., Wibowo, A. H. M., Afin, A. S., Ricnaldi, R., Putra, R, R., & Afriyadi, A. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(1), 1033–1042. https://al-haramjournal.com/index.php/PESHUM/article/download/6951/5424

Hakim, I. N. (2025). Analisis Kualitas dan Transparansi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. *Doctoral Dissertation, IAIN Metro*. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11625/1/IKHWAN NUL HAKIM_2003030017_AKS_2025.pdf

Harinin, M. F., Saputra, D., & Harmin, A. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Bansos di Kota Makassar Berbasis Web. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, *1*(2), 96–102. https://journal.isas.or.id/index.php/JACOST/article/download/85/49

Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *4*(1), 23–31. https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477

Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *11*(2), 615–620.

Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, *1*(2), 174–184. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/download/2036/2360

Maulida, R. (2025). Sistem Informasi Manajemen dalam Mendukung Akuntabilitas dan Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *10*(4), 2302–2316. https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/download/1152/775

Novianti, E., Pratama, M., & Santoso, Y. A. (2026). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Warga Penerima Manfaat di Kelurahan Menteng , Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, *8*(1), 184–200. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/34479/12686

Pilliang, M., Kristianti, T., Okpatrioka, O., & Tobondo, Y. A. (2026). Peran Sistem Informasi dalam Mendukung Pengambilan Keputusan: Systematic Literature Review (SLR). *Computatio Digitalis: Journal of Computer Science and Information Systems*, *1*(1), 13–25. https://ejournal.lppmunsaka.ac.id/index.php/computatio/article/download/14/46

Pramana, I. G. A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Pelayanan Publik di Desa Tertinggal. *Journal of Community Action*, *1*(2), 35–41.

Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, *2*(1), 42–51. https://www.academia.edu/download/89633233/427-49-1964-1-10-20210809.pdf

Rizki, M. (2021). Dampak Program Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance*, *17*(2), 125–135. https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/download/335/261

Rizqi, M. A. A., & Mursyidah, L. (2025). Effectiveness of Proposing Social Assistance Through the SIKS-NG Application in Improving the Welfare of Rural Communities. *In Proceeding of International Conference on Social Science and Humanity*, *2*(2), 290–303. https://proceedings.antispublisher.org/index.php/icossh/article/download/260/219

Safitri, S., & Sa'diyah, D. F. (2026). Efektivitas Penerapan Aplikasi SIKS-NG untuk Pendataan Bantuan Sosial Berdasarkan DTSEN di Dinas Sosial Kota Pasuruan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, *4*(1). https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/download/53097/15814

Santoso, I. A. P. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, *2*(3), 10–10.

Sarjito, A., & Djati, S. P. (2025). Administrative justice in algorithm-based social assistance distribution systems: a study of digital transparency in public services in indonesia. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *11*(2), 187–200. https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/132095/7836

Sembiring, F. F. B., & Nabanan, R. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 6779–6790. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/15559/10657

Tambunan, M., & Dompak, T. (2025). Peran E-Government Dalam Peningkatan Efesiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *12*(95), 281–288. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/8431/5940

Wahyuni, A. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Penerima Bantuan Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Distribusi. *Jurnal Sistem Komputer (SISKOM)*, *2*(2), 103–112. https://doi.org/https://doi.org/10.35870/siskom.v2i2

Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital* (M. R. Sari (ed.); Oktober 20). Serasi Media Teknologi. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=Y7U1EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Dalam+era+transformasi+digital,+pemanfaatan+teknologi+informasi+menjadi+salah+satu+alternatif+yang+banyak+diterapkan+untuk+memperkuat+sistem+pengawasan+dan+meningkatkan+kualitas+tata+kelola+program+pemerintah&ots=bo_TzLVVyZ&sig=5YfOF7hkE_QYmJSq-GuhH4Clp8g

Zebua, D. E. A., Hulu, F., Waruwu, M. H., & Mendrofa, M. S. D. (2024). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 1993–2000. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9649/6624